



**PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 13 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya regulasi baru yang mengatur mengenai perjalanan dinas, perlu di tetapkan petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4000);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.02/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Stándar Biaya Umum 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah serta perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Bone Bolango
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Kepala Daerah Bone Bolango
6. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
7. Pejabat Negara adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang merupakan unsur Pemerintah Daerah, yang membantu tugas Kepala Daerah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan
9. Unit Kerja adalah unit kerja organisasi yang merupakan bagian dari SKPD seperti UPTD atau Bagian.
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Sekertaris Daerah, Sekertaris DPRD, Sekertaris KORPRI, Kepala Dinas, Kepala Badan Inspektur, Direktur RSUD dan Kepala Kantor.
11. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dengan eselonering yang memiliki wewenang tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
12. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
13. Kepala Kantor adalah Pejabat Eselon III/a yang memimipin Satuan Kerja Mandiri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
14. Pejabat Struktural lainnya adalah Pejabat yang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV/a dan

IV/b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

15. Staf adalah Pegawai Negeri sipil yang menduduki Jabatan Fungsional teknis/umum maupun staf yang tidak menduduki jabatan fungsional teknis/umum.
16. Lembaga lainnya adalah lembaga yang memperoleh anggaran perjalanan dinas melalui APBD Kabupaten Bone Bolango.
17. Non PNS/Masyarakat adalah Pegawai Tidak Tetap/Honorer Daerah/ masyarakat yang memperoleh anggaran perjalanan dinas melalui APBD Kabupaten Bone Bolango.
18. Tenaga Ahli/Advokasi Pemerintah Daerah adalah tenaga ahli di bidang hukum non PNS yang disetarakan dengan PNS Golongan IV non Jabatan.
19. Ajudan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil/Non PNS atau TNI dan POLRI atau PNS/Pegawai yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Daerah yang disetarakan dengan PNS Golongan yang bersesuaian.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya di angkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
21. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kuasa BUD adalah PNS di lingkungan PPKD yang diangkat dan bertindak membantu tugas-tugas Bendahara Umum Daerah (BUD).
22. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
23. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian

kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

24. Surat perintah tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
25. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
26. Telaahan Staf adalah naskah dinas dan bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
27. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan penanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
30. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan di Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Lainnya dan dilakukan apabila sarana komunikasi yang tersedia mampu

memberikan hasil yang optimal secara cepat dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan, kesesuaian program dan kegiatan, serta ketersediaan anggaran atas perintah Pejabat yang berwenang.

31. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango dan antar kabupaten dalam wilayah Provinsi Gorontalo.
32. Lumpsum adalah semua biaya yang harus dibayarkan dalam bentuk makan minum, uang saku dan transportt lokal.
33. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

BAB II

TUJUAN PENETAPAN

Pasal 2

Tujuan penetapan petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango ini meliputi :

- a. Terciptanya tertib administrasi dalam pelaksanaan belanja perjalanan dinas.
- b. Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. Terciptanya efektifitas dan efisiensi serta sinkronisasi antara anggaran dan pencapaian target pelaksanaan program/kegiatan.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Biaya perjalanan dinas di golongankan dalam 7 (tujuh) tingkatan, yaitu :

- a. Tingkat A untuk KDH;
 - b. Tingkat B untuk Wakil KDH/Ketua DPRD;
 - c. Tingkat C untuk Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD;
 - d. Tingkat D untuk Eselon II/Anggota DPRD
 - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon III / PNS Golongan IV;
 - f. Tingkat F untuk Pejabat Eselon IV / PNS Golongan III;
 - g. Tingkat G untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan I / II / Non PNS.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi pejabat dan PNS pada lembaga lainnya disesuaikan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Pangkat/Golongannya
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi masyarakat/Non PNS disesuaikan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil yang dimaksud pada ayat (1) huruf g.
- (4) Untuk kepentingan protokoler, Ajudan Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas disamakan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil yang dimaksud pada ayat (1) huruf f.

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
- a. uang harian; ✓
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; ✓
 - e. sewa kendaraan dalam kota dan
 - f. Biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. uang makan;

~~b. uang transport lokal; dan~~

c. uang saku.

(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- Diket*
- a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun / *support by* bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:

- a. di hotel; atau
- b. di tempat menginap lainnya.

(5) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.

(6) Perhitungan biaya penginapan adalah $n-1$, jumlah hari perjalanan menurut SPT dikurangi satu hari.

(7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Ketua DPRD.

(8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Pasal 5

(1) Perjalanan dinas diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

- a. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan diberikan dalam bentuk biaya *Lumpsum*, kecuali untuk transport udara/darat/laut, penginapan dan sewa kendaraan dalam kota diberikan dalam bentuk biaya riil (*at cost*).
 - b. Lembaga lainnya, masyarakat, serta PNS, Eselon II, III, IV, Staf serta ajudan Pejabat Negara mendapat uang *Lumpsum* harian sesuai dengan tingkat perjalanan dinas dalam pasal 3 ayat (1).
- (2) Jika sebagian biaya ditanggung oleh pihak ke tiga atau dibebankan melalui kontribusi kepada pihak ketiga maka biaya yang diberikan adalah bagian biaya di luar kontribusi atau bagian yang tidak ditanggung oleh pihak ke tiga.
 - (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana SPPD mendapat biaya penginapan 1 (satu) hari menjelang kepulangan dan uang harian sesuai jumlah hari pada SPT.
 - (4) Biaya perjalanan dinas keluar negeri mengikuti tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Bagian kesatu

Tata Cara Belanja Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Setiap pengeluaran belanja perjalanan dinas daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara administratif difasilitasi oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran sesuai pos Belanja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

- (2) Setiap pengeluaran belanja perjalanan dinas dalam daerah bagi Pejabat Struktural, Pejabat Eselon III ke bawah, Fungsional dan Staf (Non Struktural/Fungsional serta Non PNS) pada SKPD, wajib diajukan melalui telahaan staf dan disetujui oleh Kepala SKPD.
- (3) Pengajuan telahaan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila pengeluaran belanja perjalanan dinas didasarkan atas surat undangan/permintaan yang telah didisposisi terlebih dahulu oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah dan/atau Kepala SKPD, yang substansi disposisi memerintahkan tindaklanjut atau melaksanakan materi surat tersebut.

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah bagi Pejabat Eselon II, III, IV Pejabat fungsional dan Staf (non Struktural/Fungsional, Non PNS) yang anggarannya tersedia dalam DPA-SKPD, wajib dilengkapi dengan SPT dan SPPD.
- (2) SPT dan SPPD bagi Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah atau apabila Kepala Daerah berhalangan ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah.
- (3) SPT dan SPPD bagi Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Kepala Daerah, Kepala Bagian, Staf Khusus/Fungsional Sekretaris Daerah, Tenaga Advokasi/Tenaga Ahli pemerintah Daerah dan Staf (Non Struktural/Fungsional, Non PNS) di lingkungan Sekretariat Daerah di tandatangani oleh Sekretaris Daerah atau apabila Sekretaris Daerah berhalangan didelegasikan kepada Asisten Bidang Pemerintahan dan/atau Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

- (4) SPT dan SPPD bagi Kepala SKPD dan Pejabat Fungsional utama lainnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan apabila Sekretaris Daerah berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai alur koordinasi, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (5) Untuk belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan secara berombongan oleh Pejabat Struktural Eselon III ke bawah, Pejabat Fungsional dan Staf, SPT dapat dibuat dalam satu SPT yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (6) Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretaris DPRD sesuai Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka kegiatan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretaris DPRD sesuai Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Perhitungan jangka waktu hari pelaksanaan perintah tugas perjalanan dinas dalam SPT ditetapkan oleh Pejabat yang menandatangani SPT tersebut.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas

Pasal 9

- (1). Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam daerah diwilayah Kab. Bone Bolango diberlakukan secara *Lumpsum* (termasuk biaya transportasi PP), didukung dengan SPPD rampung yang dilengkapi dengan dokumen:

- a. Telaahan Staf atau surat undangan/permintaan, SPT dan SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwewenang.
 - b. Laporan ringkas hasil pelaksanaan perjalanan dinas bagi perjalanan dinas non pemeriksaan, sedangkan untuk perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan pemeriksaan, laporannya dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilaporkan kemudian.
- (2). Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah diwilayah Propinsi Gorontalo tujuan Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan Kab. Pohuwato diberlakukan secara *Lumpsum* kecuali biaya penginapan dan transportasi secara riil (*at cost*), didukung dengan SPPD rampung yang dilengkapi dengan dokumen:
- a. Telaahan Staf atau surat undangan/permintaan, SPT dan SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwewenang dan
 - b. Laporan ringkas hasil pelaksanaan perjalanan dinas bagi perjalanan dinas non pemeriksaan, sedangkan untuk perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan pemeriksaan, laporannya dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilaporkan kemudian.

BAB V

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Belanja Perjalanan Dinas

Pasal 10

- (1) Setiap pengeluaran belanja perjalanan dinas luar daerah bagi Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah secara administratif difasilitasi oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran sesuai Pos Belanja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

- (2) Setiap pengeluaran belanja perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Eselon II, Kepala SKPD dan Eselon III wajib diajukan melalui Telaahan Staf dan disetujui oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah apabila Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berhalangan.
- (3) Setiap pengeluaran belanja perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Struktural lainnya dan Staf PNS/Non PNS pada SKPD, wajib diajukan melalui Telaahan Staf oleh Kepala SKPD dan disetujui oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Untuk perjalanan dinas luar daerah bagi pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf (non struktural/fungsional) yang dilakukan secara berombongan, proses pengajuan persetujuan telaahan staf dilakukan secara bersama dalam satu telaahan staf dengan mengikuti prosedur persetujuan telaahan staf bagi pejabat yang memiliki eselonisasi tertinggi yang melaksanakan perjalanan dinas tersebut.
- (5) Pengajuan telaahan Staf dikecualikan apabila pengeluaran belanja perjalanan dinas didasarkan atas surat masuk yang telah didisposisi terlebih dahulu oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah atas Nama KDHyang substansinya memerintahkan tindaklanjut atau melaksanakan materi surat tersebut.
- (6) Perjalanan dinas luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Eselon II, III, IV, fungsional dan Staf yang anggarannya tersedia dalam DPA-SKPD, wajib dilengkapi dengan SPT dan SPPD.

- (2) SPT dan SPPD bagi Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah atau apabila Kepala Daerah berhalangan ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk KDH.
- (3) SPT dan SPPD bagi Pejabat eselon IIb, Eselon III dan Fungsional ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau apabila Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berhalangan didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) SPPD rampung bagi Pejabat Eselon II, Eselon III dan Fungsional ditandatangani Sekretaris Daerah dan dapat di delegasikan kepada Asisten Sekretaris Daerah sesuai koordinasi dan khusus dilingkungan SKPD ditandatangani oleh oleh kepala SKPD masing-masing.
- (5) SPT dan SPPD bagi Pejabat Struktural lainnya dan Staf ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD Eselon II yang menduduki jabatan setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (6) Untuk perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Staf secara berombongan SPT dapat dibuat dalam satu SPT dengan mengikuti prosedur penandatanganan SPT bagi Pejabat yang memiliki eselonisasi tertinggi yang melaksanakan perjalanan dinas tersebut.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas

Pasal 12

Pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dilengkapi dengan dokumen:

- a. Telaahan staf/surat permintaan/undangan, SPT dan SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

- b. Bukti Tiket sesuai penggunaan transportasi baik pesawat terbang atau kendaraan darat atau kendaraan laut, dan untuk penggunaan kendaraan dinas dokumen pembuktiannya adalah Nota SPBU atau Nota Pembelian BBM.
- c. Bukti Biaya Penginapan pembuktiannya adalah Nota yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa Perhotelan atau tempat menginap lainnya;
- d. Laporan ringkas hasil pelaksanaan perjalanan dinas; dan
- e. Laporan ringkas yang disertai foto kegiatan menjadi penilaian tersendiri.

BAB VI

PRINSIP PELAKSANAAN BELANJA PERJALANAN DINAS

Pasal 13

Prinsip perhitungan pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut :

- a. Uang Harian yang dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- b. Uang Harian sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas, uang makan, uang transport lokal dan uang saku.
- c. *Lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat pada lamanya perjalanan dinas berdasarkan tiket berangkat dan tiket kembali.
- d. Pembayaran biaya tiket untuk perjalanan dinas luar daerah dihitung dengan menggunakan biaya riil (*at cost*), dengan batasan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati.
- e. Biaya riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah nilai tertera pada tiket dan/atau *boarding pass*.
- f. Tiket yang dianggap sah sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah *tiket elektronik (e-tiket)*.

- g. Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- h. Uang Representasi dibayarkan secara *lumpsum*.
- i. Sewa Kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- j. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
- k. Biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan dibayarkan secara *lumpsum*.
- l. Untuk perjalanan dinas luar daerah Kabupaten dan luar Daerah Provinsi yang menggunakan kendaraan darat/dinas atau angkutan lain selain pesawat terbang, maka pembayaran biaya transportasi dilakukan berdasarkan tiket darat, penggantian biaya Bahan Bakar Minyak atau tiket lainnya yang dibayarkan menggunakan biaya riil (*at cost*).

Pasal 14

Prinsip dan kebijakan pelaksanaan belanja perjalanan dinas meliputi :

- a. Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban administrasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- b. Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan membatasi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas, serta hanya diprioritaskan perjalanan dinas atas dasar surat undangan dan/atau permintaan dari pemerintah dan/atau kementerian atau Lembaga Pemerintah.

- c. Perjalanan dinas dalam rangka tugas konsultasi oleh pemerintah daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Pelaksanaan Peraturan Daerah atau dalam rangka pelaksanaa perumusan kebijakan atau dalam rangka kelancaran pelaksanaan program kegiatan, jumlah orang dalam melaksanakan perjalanan dinas dibatasi dan disesuaikan dengan tugas kedinasan atau fungsi organisasinya.
- d. Perjalanan dinas dalam rangka tugas konsultasi yang dilakukan secara terpadu antara pemerintah daerah dengan DPRD dapat dilakukan dengan ketentuan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan perumusan kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah.
- e. Perjalanan dinas dalam rangka studi banding atau studi komparatif dapat dilakukan dengan ketentuan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan daerah.
- f. Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat, Bimbingan Teknis, Workshop, Sosialisasi, Seminar, Lokakarya, dan lain-lain atas undangan dari Organisasi/Lembaga selain Intansi/Lembaga pemerintah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah bila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan.
- g. Perjalanan dinas dalam rangka undangan Diklat Teknis/Umum diprioritaskan bagi Pejabat atau Staf yang membidangi bidang teknis terkait, sedangkan undangan Diklat Fungsional Teknis/Umum diprioritaskan bagi Pejabat Teknis/Umum dan staf yang tidak menduduki jabatan Fungsional Teknis/Umum.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pencairan belanja perjalanan dinas dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang SPT dan SPPD rampung telah ditandatangani dan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 yang telah rampung.

Pasal 16

Setiap Pejabat atau Staf yang melaksanakan perjalanan dinas wajib melaporkan secara tertulis kepada pejabat yang memerintahkan perjalanan dinas tersebut mengenai hasil pelaksanaan perjalanan dinas dan dalam hal-hal tertentu atau apabila dipandang perlu, menyertakan dokumen visual serta dapat mempresentasikan hasil pelaksanaan perjalanan dinas tersebut dalam rapat kerja.

Pasal 17

- (1) Dokumen rampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, melalui Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD wajib segera dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango selaku Bendahara Umum Daerah beserta pengeluaran/belanja lainnya.
- (2) Perjalanan dinas selanjutnya dapat dilakukan setelah Dokumen perjalanan dinas sebelumnya telah dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biaya perjalanan dinas setiap pejabat dan staf pada SKPD dibebankan dalam DPA-SKPD dalam APBD Kabupaten Bone Bolango pada Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

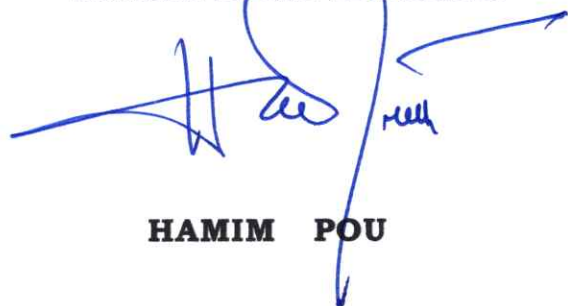
Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setaip orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 3 Juni 2013

BUPATI BONE BOLANGO



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa

Pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19641212 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
 NOMOR : 13 TAHUN 2013
 TANGGAL : 3 Juni 2013
 PERHAL : PETUNJUK PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

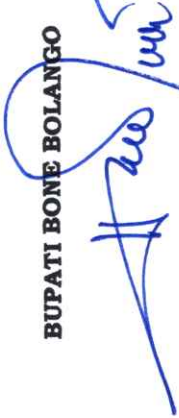
STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1) Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango				
A. Uang Harian				
a Golongan IV	Dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango (Dari/Kec.Suwawa,Suwawa Tengah,Suwawa Selatan,Suwawa Timur,Tapa,Bulango Selatan,Bulango Utara,Bulango Timur,Kabila,Tilongkabila,Botupinge,Kabila Bone)	Org/Hari	175,000	Dibayarkan secara Lumpsum
b Golongan III		Org/Hari	155,000	
c Golongan II		Org/Hari	145,000	
d Golongan I		Org/Hari	125,000	
e Honorer Daerah		Org/Hari	125,000	
a Golongan IV	Dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango (Dari/Kec.Bulawa,Bone Raya,Bone,Bulango Ulu)	Org/Hari	225,000	
b Golongan III		Org/Hari	200,000	
c Golongan II		Org/Hari	185,000	
d Golongan I		Org/Hari	165,000	
e Honorer Daerah		Org/Hari	165,000	
a Golongan IV	Dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango (Dari/Kec.Suwawa Timur (Pinogu))	Org/Hari	750,000	
b Golongan III		Org/Hari	500,000	
c Golongan II		Org/Hari	400,000	
d Golongan I		Org/Hari	300,000	
e Honorer Daerah		Org/Hari	300,000	
B. Transport				
a Suwawa - Kabila		Org/Ls	15,000	Dibayarkan secara Lumpsum
b Suwawa - Tilongkabila		Org/Ls	15,000	
c Suwawa - Tapa		Org/Ls	20,000	

URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
d Suwawa - Bulango Selatan		Org/Ls	20,000	
e Suwawa - Bulango Timur		Org/Ls	20,000	
f Suwawa - Bulango Utara		Org/Ls	25,000	
g Suwawa - Bulango Ulu		Org/Ls	35,000	
h Suwawa - Botupinge		Org/Ls	25,000	
i Suwawa - Suwawa Tengah		Org/Ls	15,000	
j Suwawa - Suwawa Selatan		Org/Ls	20,000	
k Suwawa - Suwawa Timur		Org/Ls	25,000	
l Suwawa - Kabila Bone		Org/Ls	25,000	
m Suwawa - Bonepantai		Org/Ls	35,000	
n Suwawa - Bulawa		Org/Ls	40,000	
o Suwawa - Bone Raya		Org/Ls	45,000	
p Suwawa - Bone		Org/Ls	50,000	
q Suwawa - Pinogu		Org/Ls	1,000,000	
2) Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Provinsi Gorontalo				
A. Tujuan Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo dan Kab. Gorontalo				
a Tingkat A	Bupati	Org/Hari	750,000	1. Biaya Perjalanan Terdiri dari :
b Tingkat B	Wakil Bupati dan Ketua DPRD	Org/Hari	500,000	1) Biaya Akomodasi
c Tingkat C	Sekda dan Wakil Ketua DPRD	Org/Hari	400,000	2) Uang Saku
d Tingkat D	Eselon II dan Anggota DPRD	Org/Hari	350,000	2. Dibayarkan secara Lumpsum
e Tingkat E	Eselon III / Gol. IV	Org/Hari	300,000	
f Tingkat F	Eselon IV / Gol. III	Org/Hari	250,000	
g Tingkat G	Staf Gol. II, I / Non PNS	Org/Hari	200,000	
B. Tujuan Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan Kab. Pohuwato				
a. Uang Harian				
1) Tingkat A	Bupati	Org/Hari	1,250,000	Dibayarkan secara Lumpsum
2) Tingkat B	Wakil Bupati dan Ketua DPRD	Org/Hari	1,000,000	
3) Tingkat C	Sekda dan Wakil Ketua DPRD	Org/Hari	600,000	
4) Tingkat D	Eselon II dan Anggota DPRD	Org/Hari	500,000	
5) Tingkat E	Eselon III / Gol. IV	Org/Hari	325,000	
6) Tingkat F	Eselon IV / Gol. III	Org/Hari	300,000	
7) Tingkat G	Staf Gol. II, I / Non PNS	Org/Hari	300,000	

URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp.)	KETERANGAN
b. Penginapan				
1) Tingkat A	Bupati	Org/Hari	750,000	Dibayarkan secara <i>at cost</i>
2) Tingkat B	Wakil Bupati dan Ketua DPRD	Org/Hari	500,000	
3) Tingkat C	Sekda dan Wakil Ketua DPRD	Org/Hari	300,000	
4) Tingkat D	Eselon II dan Anggota DPRD	Org/Hari	250,000	
5) Tingkat E	Eselon III / Gol. IV	Org/Hari	175,000	
6) Tingkat F	Eselon IV / Gol. III	Org/Hari	150,000	
7) Tingkat G	Staf Gol. II, I / Non PNS	Org/Hari	125,000	
c. Transport				
1) Tingkat A	Bupati	Org/Ls	1,500,000	1. Biaya transport adalah biaya BBM
2) Tingkat B	Wakil Bupati dan Ketua DPRD	Org/Ls	1,000,000	2. Dibayarkan secara <i>at cost</i>
3) Tingkat C	Sekda dan Wakil Ketua DPRD	Org/Ls	750,000	
4) Tingkat D	Eselon II dan Anggota DPRD	Org/Ls	500,000	
5) Tingkat E	Eselon III / Gol. IV	Org/Ls	150,000	
6) Tingkat F	Eselon IV / Gol. III	Org/Ls	150,000	
7) Tingkat G	Staf Gol. II, I / Non PNS	Org/Ls	150,000	

BUPATI BONE BOLANGO



HAMIM POU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 3 Juni 2013
PERIHAL : PETUNJUK PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1) Uana Harian					
1 Nangroe Aceh Darussalam	A	Bupati	Org/Hari	2,500,000	1. Uang Harian terdiri dari : - Uang makan - Uang saku - Transport lokal
	B	Wakil Bupati dan Ketua DPRD	Org/Hari	2,000,000	
	C	Sekda dan Wakil Ketua DPRD	Org/Hari	1,500,000	
	D	Eselon II dan Anggota DPRD	Org/Hari	1,200,000	
	E	Eselon III / Gol. IV	Org/Hari	1,000,000	2. Uang harian dibayarkan secara Lumpsum
	F	Eselon IV / Gol. III	Org/Hari	800,000	
	G	Staf Gol. II, I / Non PNS	Org/Hari	600,000	
2 Sumatera Utara	A		Org/Hari	2,500,000	
	B		Org/Hari	2,000,000	
	C		Org/Hari	1,500,000	
	D		Org/Hari	1,200,000	
	E		Org/Hari	1,000,000	
	F		Org/Hari	800,000	
	G		Org/Hari	600,000	
3 Riau	A		Org/Hari	2,500,000	
	B		Org/Hari	2,000,000	
	C		Org/Hari	1,500,000	
	D		Org/Hari	1,200,000	
	E		Org/Hari	1,000,000	
	F		Org/Hari	800,000	
	G		Org/Hari	600,000	
4 Kepulauan Riau	A		Org/Hari	2,500,000	
	B		Org/Hari	2,000,000	
	C		Org/Hari	1,500,000	
	D		Org/Hari	1,200,000	
	E		Org/Hari	1,000,000	
	F		Org/Hari	800,000	
	G		Org/Hari	600,000	
5 Jambi	A		Org/Hari	2,500,000	
	B		Org/Hari	2,000,000	
	C		Org/Hari	1,500,000	
	D		Org/Hari	1,200,000	
	E		Org/Hari	1,000,000	
	F		Org/Hari	800,000	
	G		Org/Hari	600,000	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
6 Sumatera Barat	A		Org/Hari	2,500,000	
	B		Org/Hari	2,000,000	
	C		Org/Hari	1,500,000	
	D		Org/Hari	1,200,000	
	E		Org/Hari	1,000,000	
	F		Org/Hari	800,000	
	G		Org/Hari	600,000	
7 Sumatera Selatan	A		Org/Hari	2,500,000	
	B		Org/Hari	2,000,000	
	C		Org/Hari	1,500,000	
	D		Org/Hari	1,200,000	
	E		Org/Hari	1,000,000	
	F		Org/Hari	800,000	
	G		Org/Hari	600,000	
8 Lampung	A		Org/Hari	2,500,000	
	B		Org/Hari	2,000,000	
	C		Org/Hari	1,500,000	
	D		Org/Hari	1,200,000	
	E		Org/Hari	1,000,000	
	F		Org/Hari	800,000	
	G		Org/Hari	600,000	
9 Bengkulu	A		Org/Hari	2,500,000	
	B		Org/Hari	2,000,000	
	C		Org/Hari	1,500,000	
	D		Org/Hari	1,200,000	
	E		Org/Hari	1,000,000	
	F		Org/Hari	800,000	
	G		Org/Hari	600,000	
10 Bangka Belitung	A		Org/Hari	3,500,000	
	B		Org/Hari	3,000,000	
	C		Org/Hari	1,900,000	
	D		Org/Hari	1,470,000	
	E		Org/Hari	1,050,000	
	F		Org/Hari	900,000	
	G		Org/Hari	800,000	
11 Banten	A		Org/Hari	3,500,000	
	B		Org/Hari	3,000,000	
	C		Org/Hari	1,900,000	
	D		Org/Hari	1,470,000	
	E		Org/Hari	1,050,000	
	F		Org/Hari	900,000	
	G		Org/Hari	800,000	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
12 Jawa Barat	A		Org./Hari	3,500,000	
	B		Org./Hari	3,000,000	
	C		Org./Hari	1,900,000	
	D		Org./Hari	1,470,000	
	E		Org./Hari	1,050,000	
	F		Org./Hari	900,000	
	G		Org./Hari	800,000	
13 D.K.I. Jakarta	A		Org./Hari	3,500,000	
	B		Org./Hari	3,000,000	
	C		Org./Hari	1,900,000	
	D		Org./Hari	1,470,000	
	E		Org./Hari	1,050,000	
	F		Org./Hari	900,000	
	G		Org./Hari	800,000	
14 Jawa Tengah	A		Org./Hari	3,000,000	
	B		Org./Hari	2,500,000	
	C		Org./Hari	1,900,000	
	D		Org./Hari	1,470,000	
	E		Org./Hari	1,050,000	
	F		Org./Hari	900,000	
	G		Org./Hari	800,000	
15 D.I. Yogyakarta	A		Org./Hari	3,000,000	
	B		Org./Hari	2,500,000	
	C		Org./Hari	1,900,000	
	D		Org./Hari	1,470,000	
	E		Org./Hari	1,050,000	
	F		Org./Hari	900,000	
	G		Org./Hari	800,000	
16 Jawa Timur	A		Org./Hari	3,000,000	
	B		Org./Hari	2,500,000	
	C		Org./Hari	1,900,000	
	D		Org./Hari	1,470,000	
	E		Org./Hari	1,050,000	
	F		Org./Hari	900,000	
	G		Org./Hari	800,000	
17 Bali	A		Org./Hari	3,500,000	
	B		Org./Hari	3,000,000	
	C		Org./Hari	1,900,000	
	D		Org./Hari	1,470,000	
	E		Org./Hari	1,050,000	
	F		Org./Hari	900,000	
	G		Org./Hari	800,000	

URAIAN	TINGKAT PERJALAMAN DINAS	SPESEIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
18 Nusa Tenggara Barat	A		Org/Hari	3,500,000	
	B		Org/Hari	3,000,000	
	C		Org/Hari	1,900,000	
	D		Org/Hari	1,470,000	
	E		Org/Hari	1,050,000	
	F		Org/Hari	900,000	
	G		Org/Hari	800,000	
19 Nusa Tenggara Timur	A		Org/Hari	3,500,000	
	B		Org/Hari	3,000,000	
	C		Org/Hari	1,900,000	
	D		Org/Hari	1,470,000	
	E		Org/Hari	1,050,000	
	F		Org/Hari	900,000	
	G		Org/Hari	800,000	
20 Kalimantan Barat	A		Org/Hari	3,000,000	
	B		Org/Hari	2,500,000	
	C		Org/Hari	1,900,000	
	D		Org/Hari	1,470,000	
	E		Org/Hari	1,050,000	
	F		Org/Hari	900,000	
	G		Org/Hari	800,000	
21 Kalimantan Tengah	A		Org/Hari	3,000,000	
	B		Org/Hari	2,500,000	
	C		Org/Hari	1,900,000	
	D		Org/Hari	1,470,000	
	E		Org/Hari	1,050,000	
	F		Org/Hari	900,000	
	G		Org/Hari	800,000	
22 Kalimantan Selatan	A		Org/Hari	3,000,000	
	B		Org/Hari	2,500,000	
	C		Org/Hari	1,900,000	
	D		Org/Hari	1,470,000	
	E		Org/Hari	1,050,000	
	F		Org/Hari	900,000	
	G		Org/Hari	800,000	
23 Kalimantan Timur	A		Org/Hari	3,000,000	
	B		Org/Hari	2,500,000	
	C		Org/Hari	1,900,000	
	D		Org/Hari	1,470,000	
	E		Org/Hari	1,050,000	
	F		Org/Hari	900,000	
	G		Org/Hari	800,000	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
24 Sulawesi Utara	A		Org/Hari	3,000,000	
	B		Org/Hari	2,500,000	
	C		Org/Hari	1,050,000	
	D		Org/Hari	650,000	
	E		Org/Hari	650,000	
	F		Org/Hari	550,000	
	G		Org/Hari	450,000	
25 Gorontalo	A		Org/Hari		
	B		Org/Hari		
	C		Org/Hari		
	D		Org/Hari		
	E		Org/Hari		
	F		Org/Hari		
	G		Org/Hari		
26 Sulawesi Barat	A		Org/Hari	3,000,000	
	B		Org/Hari	2,500,000	
	C		Org/Hari	1,050,000	
	D		Org/Hari	650,000	
	E		Org/Hari	650,000	
	F		Org/Hari	550,000	
	G		Org/Hari	450,000	
27 Sulawesi Selatan	A		Org/Hari	3,000,000	
	B		Org/Hari	2,500,000	
	C		Org/Hari	1,050,000	
	D		Org/Hari	650,000	
	E		Org/Hari	650,000	
	F		Org/Hari	550,000	
	G		Org/Hari	450,000	
28 Sulawesi Tengah	A		Org/Hari	3,000,000	
	B		Org/Hari	2,500,000	
	C		Org/Hari	1,050,000	
	D		Org/Hari	650,000	
	E		Org/Hari	650,000	
	F		Org/Hari	550,000	
	G		Org/Hari	450,000	

URAIAN	TINGKAT PERALAMAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
29 Sulawesi Tenggara	A		Org/Hari	3,000,000	
	B		Org/Hari	2,500,000	
	C		Org/Hari	1,050,000	
	D		Org/Hari	650,000	
	E		Org/Hari	650,000	
	F		Org/Hari	550,000	
	G		Org/Hari	450,000	
30 Maluku	A		Org/Hari	3,500,000	
	B		Org/Hari	3,000,000	
	C		Org/Hari	1,900,000	
	D		Org/Hari	1,470,000	
	E		Org/Hari	1,050,000	
	F		Org/Hari	900,000	
	G		Org/Hari	800,000	
31 Maluku Utara	A		Org/Hari	3,500,000	
	B		Org/Hari	3,000,000	
	C		Org/Hari	1,900,000	
	D		Org/Hari	1,470,000	
	E		Org/Hari	1,050,000	
	F		Org/Hari	900,000	
	G		Org/Hari	800,000	
32 Papua	A		Org/Hari	4,000,000	
	B		Org/Hari	3,500,000	
	C		Org/Hari	2,500,000	
	D		Org/Hari	2,000,000	
	E		Org/Hari	1,500,000	
	F		Org/Hari	1,300,000	
	G		Org/Hari	1,000,000	
33 Irian Jaya Barat	A		Org/Hari	4,000,000	
	B		Org/Hari	3,500,000	
	C		Org/Hari	2,500,000	
	D		Org/Hari	2,000,000	
	E		Org/Hari	1,500,000	
	F		Org/Hari	1,300,000	
	G		Org/Hari	1,000,000	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
12 Jawa Barat	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,500,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,000,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
13 D.K.I. Jakarta	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,500,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,000,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
14 Jawa Tengah	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,500,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,000,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
15 D.I. Yogyakarta	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,500,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,000,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
16 Jawa Timur	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,500,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,000,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
2) Biaya Penginapan					
1 Nangroe Aceh Darussalam	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,500,000	1. Biaya penginapan dibayarkan secara <i>at cost</i> 2. Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dapat menggunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar yang berbeda.
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,000,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
2 Sumatera Utara	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,500,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,000,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
3 Riau	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,500,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,000,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
4 Kepulauan Riau	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,500,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,000,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
5 Jambi	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,500,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,000,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
6 Sumatera Barat	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,500,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,000,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
7 Sumatera Selatan	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,500,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,000,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
8 Lampung	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,500,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,000,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
9 Bengkulu	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,500,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,000,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
10 Bangka Belitung	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,500,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,000,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
11 Banten	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,500,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,000,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	

URAIAN	TINGKAT PERALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
17 Bali	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,500,000	2.000.000
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,000,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
18 Nusa Tenggara Barat	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,500,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,000,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
19 Nusa Tenggara Timur	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,300,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,000,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
20 Kalimantan Barat	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,300,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,150,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
21 Kalimantan Tengah	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,300,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,200,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	

URAIAN	TINGKAT PERALAMAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
22 Kalimantan Selatan	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,420,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,200,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
23 Kalimantan Timur	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,420,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,200,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
24 Sulawesi Utara	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,350,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,200,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
25 Gorontalo	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,010,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	910,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
26 Sulawesi Barat	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,200,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,100,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
27 Sulawesi Selatan	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,500,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,350,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
28 Sulawesi Tengah	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,040,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	850,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
29 Sulawesi Tenggara	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,040,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	850,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
30 Maluku	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,200,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,000,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
31 Maluku Utara	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,350,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,000,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
32 Papua	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,300,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,080,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
33 Papua Barat	A	Hotel Bintang Empat Kelas Deluxe	Org/Hari	1,500,000	
	B	Hotel Bintang Empat Kelas Superior	Org/Hari	1,300,000	
	C	Hotel Bintang Empat Kelas Standar	Org/Hari	600,000	
	D	Hotel Bintang Tiga Kelas Deluxe	Org/Hari	600,000	
	E	Hotel Bintang Tiga Kelas Superior	Org/Hari	400,000	
	F	Hotel Bintang Tiga Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
	G	Hotel Bintang Dua Kelas Standar	Org/Hari	325,000	
3) Biaya Transport					
1 Nangroe Aceh Darussalam	A	GTLO - CGK - NAD	Org/PP	9,820,000	1. Biaya Transport dibayarkan secara <i>at cost</i>
	B - G	GTLO - CGK - NAD	Org/PP	7,820,000	
2 Sumatera Utara	A	GTLO - CGK - MES	Org/PP	9,370,000	2. Tingkat Perjalanan Dinas A: Pesawat Udara Kelas Bisnis / Kereta Api / Bus Kelas Eksekutif / Airport Tax
	B - G	GTLO - CGK - MES	Org/PP	6,870,000	
3 Riau	A	GTLO - CGK - Riau	Org/PP	8,890,000	3. Tingkat Perjalanan Dinas B s/d G: Pesawat Udara Kelas Ekonomi / Kapal Laut Kelas I B / Airport Tax
	B - G	GTLO - CGK - Riau	Org/PP	6,890,000	
4 Kepulauan Riau	A	GTLO - CGK - Kepri	Org/PP	8,870,000	
	B - G	GTLO - CGK - Kepri	Org/PP	6,870,000	
5 Jambi	A	GTLO - CGK - Jambi	Org/PP	8,890,000	
	B - G	GTLO - CGK - Jambi	Org/PP	6,890,000	
6 Sumatera Barat	A	GTLO - CGK - Sumbar	Org/PP	8,800,000	
	B - G	GTLO - CGK - Sumbar	Org/PP	6,800,000	
7 Sumatera Selatan	A	GTLO - CGK - Sumsel	Org/PP	8,830,000	
	B - G	GTLO - CGK - Sumsel	Org/PP	6,830,000	

URAIAN	TINGKAT PERALAMAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
8 Lampung	A	GTLO - CGK - Lampung	Org/pp	8,810,000	
	B - G	GTLO - CGK - Lampung	Org/pp	6,810,000	
9 Bengkulu	A	GTLO - CGK - Bengkulu	Org/pp	8,870,000	
	B - G	GTLO - CGK - Bengkulu	Org/pp	6,870,000	
10 Bangka Belitung	A	GTLO - CGK - Bgka Belitung	Org/pp	8,890,000	
	B - G	GTLO - CGK - Bgka Belitung	Org/pp	6,890,000	
11 Banten	A	GTLO - CGK - Banten	Org/pp	8,060,000	
	B - G	GTLO - CGK - Banten	Org/pp	6,060,000	
12 Jawa Barat	A	GTLO - CGK - BDJ	Org/pp	8,410,000	
	B - G	GTLO - CGK - BDJ	Org/pp	6,410,000	
13 D.K.I. Jakarta	A	GTLO - CGK	Org/pp	9,000,000	
	B - G	GTLO - CGK	Org/pp	5,720,000	
14 Jawa Tengah	A	GTLO - CGK - AMI	Org/pp	8,920,000	
	B - G	GTLO - CGK - AMI	Org/pp	6,420,000	
15 D.I. Yogyakarta	A	GTLO - CGK - JOG	Org/pp	9,400,000	
	B - G	GTLO - CGK - JOG	Org/pp	6,400,000	
16 Jawa Timur	A	GTLO - UPG - SUB	Org/pp	9,330,000	
	B - G	GTLO - UPG - SUB	Org/pp	6,330,000	
17 Bali	A	GTLO - UPG - DPS	Org/pp	9,830,000	
	B - G	GTLO - UPG - DPS	Org/pp	6,830,000	
18 Nusa Tenggara Barat	A	GTLO - CGK - NTB	Org/pp	9,940,000	
	B - G	GTLO - CGK - NTB	Org/pp	6,940,000	
19 Nusa Tenggara Timur	A	GTLO - CGK - NTT	Org/pp	9,780,000	
	B - G	GTLO - CGK - NTT	Org/pp	6,780,000	
20 Kalimantan Barat	A	GTLO - UPG - Kaibar	Org/pp	9,840,000	
	B - G	GTLO - UPG - Kaibar	Org/pp	6,840,000	
21 Kalimantan Tengah	A	GTLO - UPG - Kalteng	Org/pp	9,870,000	
	B - G	GTLO - UPG - Kalteng	Org/pp	6,870,000	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
22 Kalimantan Selatan	A	GTLO - UPG - Kalsel	Org/pp	9,820,000	
	B - G	GTLO - UPG - Kalsel	Org/pp	6,820,000	
23 Kalimantan Timur	A	GTLO - UPG - Kaltim	Org/pp	9,450,000	
	B - G	GTLO - UPG - Kaltim	Org/pp	6,450,000	
24 Sulawesi Utara	A	GTLO - MDC	Org/pp	2,340,000	
	B - G	GTLO - MDC	Org/pp	1,840,000	
25 Gorontalo	A		Org/pp		
	B - G		Org/pp		
26 Sulawesi Barat	A	GTLO - UPG - Sulbar	Org/pp	4,870,000	
	B - G	GTLO - UPG - Sulbar	Org/pp	3,870,000	
27 Sulawesi Selatan	A	GTLO - UPG	Org/pp	3,810,000	
	B - G	GTLO - UPG	Org/pp	2,810,000	
28 Sulawesi Tengah	A	GTLO - UPG - PLW	Org/pp	4,930,000	
	B - G	GTLO - UPG - PLW	Org/pp	3,930,000	
29 Sulawesi Tenggara	A	GTLO - UPG - KDI	Org/pp	4,820,000	
	B - G	GTLO - UPG - KDI	Org/pp	3,820,000	
30 Maluku	A	GTLO - UPG - Ambon	Org/pp	9,670,000	
	B - G	GTLO - UPG - Ambon	Org/pp	6,670,000	
31 Maluku Utara	A	GTLO - UPG - Ternate	Org/pp	9,780,000	
	B - G	GTLO - UPG - Ternate	Org/pp	6,780,000	
32 Papua	A	GTLO - UPG - Papua	Org/pp	10,560,000	
	B - G	GTLO - UPG - Papua	Org/pp	7,560,000	
33 Irian Jaya Barat	A	GTLO - UPG - DB	Org/pp	10,780,000	
	B - G	GTLO - UPG - DB	Org/pp	7,780,000	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
19 Nusa Tenggara Timur	A		Org	1,000,000	
	B		Org	750,000	
	C		Org	600,000	
	D		Org	500,000	
20 Kalimantan Barat	E - G		Org	400,000	
	A		Org	1,000,000	
	B		Org	750,000	
	C		Org	600,000	
21 Kalimantan Tengah	D		Org	500,000	
	E - G		Org	400,000	
	A		Org	1,000,000	
	B		Org	750,000	
22 Kalimantan Selatan	C		Org	600,000	
	D		Org	500,000	
	E - G		Org	400,000	
	A		Org	1,000,000	
23 Kalimantan Timur	B		Org	750,000	
	C		Org	600,000	
	D		Org	500,000	
	E - G		Org	400,000	
24 Sulawesi Utara	A		Org	1,000,000	
	B		Org	750,000	
	C		Org	600,000	
	D		Org	500,000	
25 Gorontalo	E - G		Org	400,000	
	A		Org		
	B		Org		
	C		Org		
26 Sulawesi Barat	D		Org		
	E - G		Org		
	A		Org	1,000,000	
	B		Org	750,000	
	C		Org	600,000	
	D		Org	500,000	
	E - G		Org	400,000	

URAIAN	TINGKAT PERJALAMAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
27 Sulawesi Selatan	A		Org	1,000,000	
	B		Org	750,000	
	C		Org	600,000	
	D		Org	500,000	
28 Sulawesi Tengah	E - G		Org	400,000	
	A		Org	1,000,000	
	B		Org	750,000	
	C		Org	600,000	
29 Sulawesi Tenggara	D		Org	500,000	
	E - G		Org	400,000	
	A		Org	1,000,000	
	B		Org	750,000	
30 Maluku	C		Org	600,000	
	D		Org	500,000	
	E - G		Org	400,000	
	A		Org	1,000,000	
31 Maluku Utara	B		Org	750,000	
	C		Org	600,000	
	D		Org	500,000	
	E - G		Org	400,000	
32 Papua	A		Org	1,000,000	
	B		Org	750,000	
	C		Org	600,000	
	D		Org	500,000	
33 Irian Jaya Barat	E - G		Org	400,000	
	A		Org	1,000,000	
	B		Org	750,000	
	C		Org	600,000	
	D		Org	500,000	
	E - G		Org	400,000	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
5) Uang Representatif					
a Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	A	750.000	Org/Hari	250,000	Uang representatif hanya diperuntukan bagi tingkat perjalanan dinas A, B, C dan D.
b Ketua DPRD	B	500.000	Org/Hari	190,000	
c Wakil Ketua DPRD	C		Org/Hari	130,000	
d Sekretaris Daerah	C		Org/Hari	130,000	
e Pejabat Eselon II / Anggota DPRD	D		Org/Hari	130,000	
6) Angkutan Dalam Kota/Sewa Kendaraan					
a Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	A	600.000	Org/Hari	500,000	Termasuk Sopir dan BBM (diperikan secara at cost).

Penjelasan Tingkat Perjalanan Dinas

- Tingkat Perjalanan Dinas A, meliputi:
 - Kepala Daerah
- Tingkat Perjalanan Dinas B, meliputi:
 - Wakil Kepala Daerah/Ketua DPRD
- Tingkat Perjalanan Dinas C, meliputi:
 - Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD
- Tingkat Perjalanan Dinas D, meliputi:
 - Pejabat Eselon II/Anggota DPRD
- Tingkat Perjalanan Dinas E, meliputi:
 - Pejabat Eselon III / Golongan IV
- Tingkat Perjalanan Dinas F, meliputi:
 - Pejabat Eselon IV / Golongan III
- Tingkat Perjalanan Dinas G, meliputi:
 - PNS Golongan II, I dan Non PNS

BUPATI BONE BOLANGO

HAMIM POU

URAIAN	TINGKAT PERALAMAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
10 Bangka Belitung	A		Org	1,000,000	
	B		Org	750,000	
	C		Org	600,000	
	D		Org	500,000	
11 Banten	E - G		Org	400,000	
	A		Org	1,000,000	
	B		Org	750,000	
	C		Org	600,000	
12 Jawa Barat	D		Org	500,000	
	E - G		Org	400,000	
	A		Org	1,000,000	
	B		Org	750,000	
13 D.K.I. Jakarta	C		Org	600,000	
	D		Org	500,000	
	E - G		Org	400,000	
	A		Org	1,000,000	
14 Jawa Tengah	B		Org	1,000,000	
	C		Org	750,000	
	D		Org	600,000	
	E - G		Org	500,000	
15 D.I. Yogyakarta	A		Org	1,000,000	
	B		Org	750,000	
	C		Org	600,000	
	D		Org	500,000	
16 Jawa Timur	E - G		Org	400,000	
	A		Org	1,000,000	
	B		Org	750,000	
	C		Org	600,000	
17 Bali	D		Org	500,000	
	E - G		Org	400,000	
	A		Org	1,000,000	
	B		Org	750,000	
18 Nusa Tenggara Barat	C		Org	600,000	
	D		Org	500,000	
	E - G		Org	400,000	
	A		Org	1,000,000	
	B		Org	750,000	
	C		Org	600,000	
	D		Org	500,000	
	E - G		Org	400,000	